



EDISI SELASA 27 JANUARI 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

Rincian Utama Kasus Tersebut

○ DAKWAAN PEMERASAN:

Noel didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,5 miliar bersama 10 orang lainnya dalam proses penerbitan dan perpanjangan lisensi K3.

○ PENERIMAAN DANA:

Jaksa KPK menyebut Noel menerima gratifikasi sebesar Rp 3,3 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati. Noel sendiri telah mengakui menerima sekitar Rp 3 miliar dan menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

○ PERKEMBANGAN SIDANG:

Sidang perdana digelar pada 19 Januari 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang lanjutan tanggal 26 Januari 2026, Noel mengklaim adanya keterlibatan pihak lain, termasuk satu organisasi masyarakat (ormas) non-agama dan satu partai politik yang memiliki huruf "K" dalam namanya.

○ KONTEKS PELANGGARAN:

Praktik ini diduga terjadi pada periode 2019 hingga 2025, di mana para pemohon sertifikasi K3 diminta membayar "jatah" tertentu.

02

GOVERNMENT TODAY

Anggaran Kemenhub Terancam Disuntik Buntut Kapal Asing Tak Bayar Pajak

04

NUSANTARA

23 Marinir Tertimbun Longsor Cisarua sedang Latihan Sebelum ke Papua Nugini

10

LISTSTYLE

Musim Hujan Tetap Kece, Ini 5 Jaket yang Wajib Ada di Lemari

TEKA-TEKI PARTAI 'K' DI KASUS KORUPSI K3

Noel Ngotot Tak Terima Uang Pemerasan

Kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan kian berlapis. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengklaim ada partai politik dengan nama yang ada huruf 'K', ikut menikmati aliran dana perkara tersebut. Meski hingga kini identitas parpol itu masih menjadi teka-teki. Diketahui, sebanyak 8 partai politik berhasil lolos ke DPR RI periode 2024-2029 dengan total 580 kursi, didominasi oleh PDI-P (110 kursi) dan Golkar (102 kursi). Partai lain yang lolos meliputi Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Di sisi lain, Noel membantah menerima uang hasil korupsi dan bahkan mengaku tidak memahami urusan K3. Dia pun mengaku tak mengerti apa istilah singkatan dari K3. Noel menyatakan siap dihukum mati

jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Ia mengklaim sikap itu sebagai bentuk konsistensinya terhadap pandangan bahwa pelaku korupsi layak dijatuhi hukuman paling berat. Saat Noel menyatakan tidak keciran duit pemerasan, fakta persidangan justru membuka potret lain di internal Kemnaker. Sejumlah pegawai disebut menganggap uang nonteknis dari proses sertifikasi K3 sebagai 'rezeki' yang dibagi secara berjenjang. Duh. BACA DI HAL 11...

Partai Beserta dan Jumlah Perolehan Kursinya di DPR RI

PDIP
110 KURSI

NasDem
69 KURSI

Golkar
102 KURSI

PKB
68 KURSI

Gerindra
86 KURSI

PKS
53 KURSI

Demokrat
44 KURSI

PAN
48 KURSI

ANGGARAN KEMENHUB TERANCAM DISUNAT

BUNTUT KAPAL ASING TAK BAYAR PAJAK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait belum tertibnya pemungutan pajak kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Menkeu bahkan mengancam akan 'menyunat' anggaran Kemenhub jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Ancaman itu disampaikan Purbaya saat memimpin Sidang Terbuka Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) dalam agenda penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking, yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Asosiasi INSA ya, tiga bulan ini Anda lihat, yang domestik ada perbedaan apa nggak. Kalau mereka nggak ada perbedaan, nanti lapor kami lagi. Kami akan punish Kemenhub," tegas Purbaya.

Ia menegaskan, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan nyata di lapangan, sanksi fiskal akan diberlakukan. "Kalau enggak (ada perbaikan), nanti saya potong anggarannya," ujar Purbaya.

Purbaya menyoroti ketimpangan serius dalam penerimaan pajak sektor pelayaran. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)



Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026), bersama beberapa menteri dan pejabat negara. ANTARA

Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari aktivitas pelayaran domestik mencapai sekitar Rp24 triliun per tahun. Sebaliknya, kontribusi dari pelayaran asing hanya sekitar Rp600 miliar, padahal potensi penerimaannya diperkirakan bisa menembus Rp19 triliun.

"Itu cuma satu per sepuluhnya.

"Kalau digalakkan masih bisa nggak?" kata Purbaya mempertanyakan kinerja pengawasan kepada perwakilan Kemenhub yang hadir.

Menurut Purbaya, ketimpangan ini mengindikasikan masih lemahnya implementasi aturan perpajakan terhadap kapal asing, termasuk

dugaan praktik pemanfaatan tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) secara tidak semestinya.

Untuk itu, ia meminta Kemenhub segera memperbaiki prosedur penerbitan izin berlayar, dengan mewajibkan kapal asing melampirkan bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) maupun dokumen tax treaty sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.

"Kalau bisa satu minggu dari sekarang sudah keluar peraturannya ke perusahaan-perusahaan pelayaran asing yang masuk ke sini. Jadi aturan mainnya jelas, bukan gelap," tegas Purbaya.

Ia menambahkan, ancaman pemangkas anggaran tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah agar kebijakan benar-benar dijalankan di lapangan. "Artinya kita serius memastikan itu berjalan. Warning itu supaya jalan. Kalau nggak jalan, ya nanti ada konsekuensinya," ujar Purbaya, sembari berkelakar soal sanksi administratif.

Purbaya meminta Kemenhub segera mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem penerbitan SPB, termasuk melalui aplikasi Inaportnet. Dengan kebijakan itu, baik kapal nasional maupun kapal asing akan diperlakukan setara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyatakan siap mendukung instruksi tersebut dan mengintegrasikan persyaratan pajak ke dalam sistem perizinan.

Satgas P2SP pun akan melakukan pemantauan ketat dalam satu hingga dua minggu ke depan, serta evaluasi lanjutan dalam tiga bulan mendatang. Jika dalam periode tersebut tidak ada perubahan signifikan di lapangan, pemerintah menegaskan sanksi terhadap Kemenhub akan diberlakukan.

"Mulai minggu depan samakan. Tiga bulan ke depan INSA lihat, kalau tidak ada perbedaan, laporan ke kami lagi. Kami akan punish Kementerian Perhubungan," pungkas Purbaya.

Peringatan keras dari Menteri Keuangan tersebut berangkat dari laporan Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang mengungkap masih maraknya kapal asing beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban perpajakan. (wid,ist,kum/dya)

Pekan Depan Sidak Perusahaan Baja yang Mangkir

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan perpajakan dengan merencanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan sektor baja yang terindikasi mangkir dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sidak tersebut dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini dan saat ini masih dalam tahap persiapan oleh tim Kementerian Keuangan.

"Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari-dua hari deh," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya memberi sinyal bahwa perusahaan baja yang akan disidak berlokasi di Jakarta. Ia menegaskan langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menindak tegas praktik pengemplangan pajak yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. "Harusnya minggu ini, kami sedang siapkan. [Lokasinya] Jakarta, kayaknya," tutur Menkeu.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan terdapat sekitar 40 perusahaan sektor baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk China, serta tidak menutup kemungkinan berasal dari dalam negeri.

Menkeu menyatakan pihaknya akan menyisir seluruh perusahaan yang terindikasi mengemplang pajak untuk memastikan kewajiban kepada negara dipenuhi, tanpa pandang bulu. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan dalam negeri tetap akan ditindak jika terbukti melakukan pelanggaran.

Dugaan pengemplangan pajak di sektor baja ini pertama kali diungkapkan Purbaya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut terdapat perusahaan asing yang menjual produk baja langsung ke klien secara tunai guna menghindari kewajiban pembayaran PPN.

Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga melakukan manipulasi data ketenagakerjaan, termasuk membeli Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memalsukan jumlah pegawai.

Atas praktik manipulatif tersebut, Purbaya menilai potensi kerugian

negara sangat besar. Bahkan, satu perusahaan saja disebut bisa meraih pendapatan hingga Rp4 triliun per tahun.

"Potensinya, kata orang yang sudah insaf, setahun bisa Rp4 triliun lebih. Jadi besar," ujar Purbaya.

Tidak hanya menyasar perusahaan, Purbaya juga menyampaikan bahwa evaluasi internal akan dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut ditempuh untuk menelusuri keungan kita dan nyata persengkolan atau pembiaran dalam praktik pengelapan pajak.

Di tengah pengetatan pengawasan terhadap kepatuhan pajak korporasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga melaporkan perkembangan signifikan dalam implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.

Hingga 26 Januari 2026, DJP mencatat sebanyak 12,52 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax. Dari jumlah tersebut, sekitar 11,58 juta merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah siap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem tersebut. (wid,ist,dya)

SEMPAT DINONAKTIFKAN PARTAI, ADIES KADIR KINI MELENGGANG JADI HAKIM MK

Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusulkan oleh lembaga legislatif. Penetapan ini berlangsung cepat dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Diketahui Adies sebelumnya sempat dinonaktifkan Partai Golkar akibat pernyataan kontroversial yang memicu gelombang demonstrasi pada Agustus 2025.

Persetujuan Komisi III DPR ini sekaligus menempatkan Adies sebagai calon pengganti hakim konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026.

Kejutan lain, keputusan tersebut diambil setelah DPR sebelumnya telah menyetujui Inosentius Samsul sebagai pengganti Arief Hidayat dalam rapat paripurna DPR pada Agustus 2025. Komisi III DPR belum memberikan penjelasan resmi terkait hal tersebut.

Diketahui, Adies mengikuti uji kelayakan sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, ia memaparkan makalah mengenai penguan Mahkamah Konstitusi serta tantangan konstitusional yang dihadapi lembaga tersebut. Seluruh fraksi di Komisi III DPR langsung menyatakan persetujuan bulat. Rapat pun ditutup sekitar pukul 14.55 WIB.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, saat membacakan kesimpulan rapat, menyatakan, Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR.

"Untuk selanjutnya dapat



Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir disepakati menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (ist.kcm)

diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga menegaskan tidak akan ada konflik kepentingan bagi Adies ketika kelak menguji undang-undang yang disahkan DPR. Menurutnya, pembentukan undang-undang merupakan proses kolektif lembaga, bukan kepentingan personal legislator.

"Ketika nanti aktif menjadi Hakim Konstitusi, Pak Adies Kadir tidak memiliki konflik kepentingan kalau harus memeriksa atau menguji

materi UU yang disahkan DPR. Ini hal wajar, umum, dan sudah menjadi pengetahuan semua orang," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah sepakat menyetujui Adies sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. "Semua fraksi menyetujui," ujarnya.

Ia mengakui proses uji kelayakan berlangsung singkat karena para anggota DPR telah mengenal Adies sebelumnya. "Kan, kami sudah kenal beliau," kata Safaruddin. (gus,ist,rls/dya)

Profil Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum

- TEMPAT, TANGGAL LAHIR: Balikpapan, 17 Oktober 1968.
- PARTAI POLITIK: Golongan Karya (Golkar).
- DAERAH PEMILIHAN (DAPIL): Jawa Timur I (Surabaya & Sidoarjo).
- GELAR AKADEMIK: Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang (sejak Desember 2025).
- KARRIER POLITIK DAN JABATAN
 - Wakil Ketua DPR RI (2024-2029): Membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korinekcieu), yang meliputi Komisi XI, XII, XIII, Badan Anggaran, dan BAKN.
 - Hakim Mahkamah Konstitusi (2026): Terpilih dan disetujui pada Januari 2026 untuk menggantikan posisi Arief Hidayat di MK.
 - Anggota DPR RI: Menjabat secara berturut-turut sejak tahun 2014.
- KONTROVERSI TUNJANGAN: Pada Agustus-September 2025, ia sempat menjadi sorotan publik dan dinonaktifkan sementara dari keanggotaan DPR oleh Partai Golkar akibat pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan rumah dinas dan biaya hidup anggota dewan yang memicu unjuk rasa.
- REAKTIVASI JABATAN: Ia diaktifkan kembali sebagai Wakil Ketua DPR RI pada November 2025 setelah putusan MKD.
- HARTA KEKAYAAN: Berdasarkan LHKPN Desember 2024, ia memiliki kekayaan sekitar Rp14,3 miliar.



Gugat Pasal Korupsi di KUHP ke MK: Mahasiswa Desak Pidana Mati Koruptor

Dua mahasiswa hukum, Bernita Matondang dan Vandy Setiawan, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta agar ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru memuat pidana mati sebagai sanksi paling berat bagi pelaku korupsi.

Permohonan tersebut teregister dengan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan diajukan karena para Pemohon menilai pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut mereka, ketiadaan pidana mati sebagai ancaman maksimal menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kepentingan publik, khususnya hak sosial dan ekonomi masyarakat.

"Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru yang tidak menyediakan sanksi pidana paling berat berupa pidana mati bertentangan dengan logika perlindungan hak sosial-ekonomi masyarakat, karena gagal melindungi sumber daya fiskal yang menjadi tulang punggung kebijakan kesejahteraan," ujar Vandy Setiawan di Gedung MK, Senin (26/1/2026).

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Vandy menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan

konvensional. Ia menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sistemik, meluas, dan berjangka panjang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Vandy, keberlakuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru secara langsung mempengaruhi proses pembelajaran dan pemahaman para Pemohon sebagai mahasiswa hukum dalam menganalisis konstruksi pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa.

"Keberlakuan norma a quo secara langsung mempengaruhi proses pembelajaran analisis ilmiah dan pemahaman para Pemohon mengenai konstruksi pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa," ucapnya.

Selain berstatus sebagai

mahasiswa hukum, para Pemohon juga menegaskan posisi mereka sebagai warga negara yang secara faktual telah dan akan terus memenuhi kewajiban membayar pajak, termasuk pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan jenis pajak lainnya. Oleh karena itu, mereka mengklaim memiliki kepentingan konstitusional atas perlindungan sumber daya fiskal negara dari praktik korupsi.

"Korupsi membutuhkan pendekatan pemidanaan yang juga bersifat luar biasa, baik dari sisi beratnya sanksi pidana maupun daya cegah yang ditimbulkan," kata Vandy. (wid,ist,kum/dya)

23 MARINIR TERTIMBUN LONGSOR CISARUA SEDANG LATIHAN SEBELUM KE PAPUA NUGINI

Bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menimbulkan duka mendalam. Sebanyak 23 prajurit TNI Angkatan Laut dari satuan Marinir dilaporkan tertimbun material longsor saat berada di lokasi tersebut. Hingga Senin (26/1/2026), empat personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara sisanya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan informasi tersebut usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyampaikan pernyataan tersebut atas izin Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor," kata Ali, Senin (26/1/2026).

Ali menambahkan, hingga saat ini tim telah berhasil menemukan empat korban jiwa dari prajurit Marinir yang tertimbun.

"Saat ini sudah diketemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal



Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (26/1/2026). (ant)

dunia," ujarnya.

Menurut KSAL, proses pencarian terhadap prajurit yang belum ditemukan masih terus dilakukan. Namun, upaya evakuasi menghadapi

sejumlah kendala di lapangan, terutama akibat kondisi medan yang berat, cuaca ekstrem, serta akses jalan yang sempit dan rusak sehingga menyulitkan masuknya alat berat.

PREDIKSI CUACA BMKG HINGGA AKHIR JANUARI 2026:

POTENSI CUACA EKSTREM:

Peningkatan intensitas curah hujan hingga kategori lebat dan sangat lebat diprediksi terjadi di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara hingga akhir Januari.

PERINGATAN DINI JAWA BARAT:

Secara khusus untuk wilayah Jawa Barat, termasuk area Cisarua, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sangat lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang hingga 29 Januari 2026.

PENYEBAB DINAMIKA ATMOSFER:

Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Siklon Tropis 97S di Samudra Hindia serta gangguan atmosfer lainnya yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah selatan Indonesia.

OPERASI MODIFIKASI CUACA (OMC):

Untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem di lokasi bencana, BMKG bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat melakukan operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan berlangsung hingga 29 Januari 2026 guna mengurangi intensitas hujan di area terdampak.



"Dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil," kata Ali.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, TNI AL bersama tim SAR gabungan mengerahkan berbagai teknologi pendukung dalam pencarian korban.

"Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak," tutur Ali.

Lebih lanjut, KSAL menjelaskan bahwa 23 prajurit Marinir tersebut sedang menjalani latihan di wilayah Cisarua. Latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan penugasan pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) setelah pelatihan selesai.

"Memang mereka sedang melaksanakan latihan petugas untuk dikirim melaksanakan PAM perbatasan RI-PNG ya, memang dilaksanakan di latihannya di sana," ucap Ali.

Ali menduga, longsor dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut dalam waktu lama sebelum kejadian.

"Dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir dua malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana," kata Ali. (wid,ist,dta/dya)

DPR: Apakah Harus Terjadi Bencana Dulu?

BENCANA tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memicu sorotan tajam dari DPR RI terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan tata ruang nasional. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan, mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilai baru bergerak melakukan pencabutan izin usaha setelah bencana terjadi.

Kritik tersebut disampaikan Sigit dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam rapat itu, Menteri Hanif memaparkan langkah kementeriannya dalam menindak sejumlah usaha yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pascabencana di wilayah Sumatera.

Hanif menyebut, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat 28 unit usaha yang diminta untuk dicabut izinnya. Hingga saat ini, delapan unit usaha telah disiapkan untuk pencabutan persetujuan lingkungannya.

"Terkait upaya pencabutan 28 unit

usaha sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden dalam ratus baru-baru kemarin, izinkan kami untuk sisi kehutanan kami telah siapkan pencabutan persetujuan lingkungan pada 8 entitas usaha utama yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana kita lihat di depan kita," ujar Hanif.

Ia menjelaskan, delapan unit usaha tersebut telah dinyatakan melanggar ketentuan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pendalaman para ahli.

"Jadi ada 8 unit usaha yang berdasarkan verifikasi lapangan dan pendalaman ahli telah melanggar 5 lokasi ini, saat ini kita siapkan pencabutan persetujuan lingkungannya," ucapnya.

Sementara itu, 20 unit usaha lainnya masih dalam proses pendalaman oleh kementerian teknis terkait. Hanif menegaskan, pencabutan izin usaha oleh kementerian teknis akan otomatis diikuti pencabutan persetujuan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Yang 20 unit usaha tentu kami menunggu dari kementerian teknis yang akan cabut, karena berdasarkan norma kami bilamana teknis usahanya dicabut maka persetujuan lingkungan

jugak akan kami cabut," kata Hanif.

Menanggapi penjelasan tersebut, Sigit Karyawan menilai kebijakan pencabutan izin sebagai langkah luar biasa jika benar-benar diterapkan secara konsisten. Namun, ia menilai penegakan hukum lingkungan harus menjadi fokus utama pemerintah, bukan sekadar respons reaktif pascabencana.

"Ini kebijakan luar biasa kalau itu betul-betul kita terapkan," ujar Sigit.

Ia menambahkan, sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia saat ini berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan.

"Sekarang wilayah yang menjadi epicentrum di Indonesia ini kebanyakan banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis air," katanya.

Sigit juga mempertanyakan pola evaluasi izin usaha dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dinilai baru dilakukan setelah bencana terjadi.

"Apakah kita harus terjadi dulu bencana baru dilakukan pencabutan izin? Karena wilayah kami, provinsi lain juga tidak mau terjadi bencana," ucap Sigit menjadi faktor penting. (wid,ist/dya)

BOS MAKTOUR BANTAH KONGKALIKONG DENGAN YAQUT

Pemilik biro perjalanan haji dan umrah PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), membantah keras dugaan keterlibatannya dalam pengaturan pembagian kuota haji bersama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bantahan itu disampaikan Fuad sesaat sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Fuad tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.05 WIB dengan mengenakan sweater hitam bergaris dan membawa sejumlah dokumen. Ia datang didampingi seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Pemeriksaan tersebut merupakan kali kedua Fuad dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, namun menjadi pemeriksaan pertamanya setelah KPK resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

"Ini yang kedua kalinya ya. Kalau yang ini. Tapi kalau ini baru yang pertama. Setelah ada penetapan yang pertama," ujar Fuad kepada awak media.

Menanggapi tuduhan bahwa Maktour menerima kuota haji dalam jumlah besar pada 2024, Fuad menegaskan informasi tersebut tidak sesuai fakta. Ia membantah menerima ribuan kuota sebagaimana isu yang berkembang.

"Tidak sampai 300. Jadi bayangan begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua," kata Fuad.

Fuad juga menepis dugaan adanya kongkalikong dengan Yaqut dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang dibagi masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus—skema yang dinilai menaburkatan.

"Sangat tidak ada. Jadi saya sangat sayangkan. Seolah-olah bisa saya dapatkan," ujarnya.

Usai pemeriksaan, Fuad menegaskan bahwa pembagian kuota haji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menyebut pihak travel hanya menjalankan apa yang ditugaskan.

"Semua itu (pembagian kuota) menjadi tanggung jawabnya Departemen Agama (Kemenag). Kami tidak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan," kata Fuad.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah jemaah Maktour justru mengalami penurunan signifikan sejak 2023, bahkan mencapai lebih dari 50 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Itu bisa (berkurang) sampai 50 persen lebih. Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa kirim 600-an, pada justru waktu ada penambahan kuota kami berkurang sangat drastis," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Fuad mengaku dikonfirmasi terkait pembiayaan pemberangkatan jemaah haji yang dikeluarkan oleh



Pemilik perusahaan perjalanan biro haji dan umrah PT Maktour Fuad Hasan Masyhur berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026). (ant)

perusahaannya. Pemeriksaan turut melibatkan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dikonfirmasi soal apa lagi namanya, semua pembiayaan-pembiayaan yang kami keluarkan. Karena tentunya tidak bisa disamakan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara lain dan kami juga. Jadi

itu ada perbedaanya," ucapnya.

Dugaan keterlibatan Fuad Hasan Masyhur dalam pengaturan pembagian kuota haji mencuat dari keterangan resmi KPK saat memeriksa yang bersangkutan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik secara khusus mendalami peran Fuad dalam skema

JADWAL KEBERANGKATAN & PEMULANGAN

- 21 April 2026: Jamaah mulai masuk ke Asrama Haji.
- 22 April 2026: Keberangkatan kloter pertama (Gelombang I) menuju Madinah.
- 7 Mei 2026: Keberangkatan Gelombang II menuju Makkah.
- 21 Mei 2026: Batas akhir kedatangan penerbangan internasional jamaah haji di Arab Saudi.
- 1 Juni 2026: Awal pemulangan jemaahnya haji ke Indonesia.

pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyalahi ketentuan per undang - undangan. (wid,ist,kcm/dya)

Minta Fatwa MUI: Haji Pakai Uang Korupsi dan Jalur Ilegal Diharamkan



Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak saat berbincang dengan peserta Diklat PPIH Arab Saudi dari Media Center Haji, Senin (26/1/2026). (ist.mch)

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan sejumlah fatwa yang mempertegas prinsip kehalalan dan legalitas dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satu fatwa yang diusulkan adalah penegasan bahwa menunaikan ibadah haji menggunakan uang hasil korupsi merupakan perbuatan haram.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). Dahnil menekankan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara-cara yang hasanah atau baik dan halal, baik dari sisi pembiayaan maupun prosedur keberangkatan.

"Misalnya ada fatwa juga mengatakan bahwasanya naik haji itu harus dengan cara-cara yang hasanah. Artinya kalau naik haji dengan uang korupsi misalnya, dengan uang yang tidak baik, tidak halal, itu haram," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, penguanan fatwa semacam itu penting untuk

terus mengingatkan umat Islam bahwa kesucian ibadah haji tidak hanya terletak pada ritualnya, tetapi juga pada sumber dana dan proses yang dijalani sejak awal.

Selain soal sumber dana, Kemenhaj juga mendorong MUI mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa berhaji melalui jalur ilegal adalah haram. Praktik jalur ilegal yang dimaksud, antara lain, penggunaan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji.

"Misalnya cara ilegal itu tidak menggunakan visa resmi haji. Visa resmi haji itu kan visa yang memang dikeluarkan secara resmi, ada visa yang berdasarkan kuota, kemudian ada visa yang dikeluarkan memang visa haji, bukan visa non-haji," jelasnya.

Ia menegaskan, penggunaan visa di luar ketentuan resmi haji bertentangan dengan aturan dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi jemaah maupun pemerintah. (wid,ant/dya)

Pembebasan Lahan Tol Malang-Kepanjen

Ditarget Mulai 2027



Ilustrasi: Pintu masuk exit tol Singosari, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Proyek jalan tol Malang-Kepanjen kini memasuki tahap review basic design dan feasibility study (FS), yakni peninjauan ulang rancangan teknis awal serta kajian kelayakan proyek. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan proses pembebasan lahan dapat dimulai pada 2027, apabila seluruh tahapan perencanaan berjalan tanpa kendala.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(PU) Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, mengatakan pembangunan tol Malang-Kepanjen menjadi prioritas utama karena perannya yang vital dalam membuka akses lintas wilayah, sekaligus mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata di Malang selatan, termasuk Pantai Balekambang.

"Kita fokuskan ke jalan tol dulu. Jalan tol ini sekarang sedang review basic design dan review FS. Tahun 2027, Insya

Allah mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan mulai pembebasan lahan," ujar pria yang akrab disapa Oong, dikutip pada Senin (26/1/2026).

Menurutnya, keberadaan tol Malang-Kepanjen nantinya akan terintegrasi dengan jalur Bantur-Balekambang, sehingga menciptakan akses langsung dari wilayah utara ke selatan Kabupaten Malang.

Konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pantai selatan (Pansela) secara lebih merata.

"Setelah itu akan terhubung dengan Bantur ke Balekambang. Jadi akses dari utara ke selatan sudah terkoneksi lewat jalan tol, tinggal nanti kita perkuat konektivitas ke wilayah timur," jelasnya.

Pemkab Malang menargetkan kawasan Pansela dapat berkembang layaknya kawasan Pantai Utara (Pantura), dengan dukungan infrastruktur jalan yang memadai dan terhubung antarkawasan strategis.

Selain proyek tol, Pemkab Malang juga terus mendorong peningkatan akses jalan pendukung. Salah satunya adalah ruas jalan Kepanjen-Pagak yang telah mendapatkan persetujuan pendanaan, meski besaran anggaran final masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

"Sudah disetujui, alhamdulillah. Hanya saja nilainya belum tahu pasti. Yang kami ajukan saat ini kurang lebih sepanjang 13 kilometer," ungkap Oong.

Dijelaskannya, total usulan peningkatan jalan Kepanjen-Pagak tersebut diajukan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD),

dengan estimasi kebutuhan anggaran berkisar antara Rp49 miliar hingga Rp65 miliar.

"Konsepnya komplit, ada U-ditch kiri kanan, drainase, pelebaran jalan, serta peninggian badan jalan," terangnya.

Lebih lanjut, Oong menyebutkan lebar jalan eksisting saat ini masih sekitar 5,5 meter, dan ditargetkan menjadi minimal 7 meter agar memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Bahkan, apabila kondisi lahan memungkinkan, pelebaran dapat mencapai 7,5 meter.

"Paling tidak idealnya 7 meter. Kalau bisa dilebarkan satu meter di kiri dan kanan, hasil akhirnya bisa sampai 7,5 meter," katanya.

Sebagai informasi, peningkatan ruas Kepanjen-Pagak sebelumnya telah dikerjakan melalui skema IJD 2024 sepanjang 3,1 kilometer, dimulai dari Perempatan Kepanjen hingga Stationing (STA) 3.100. Sementara itu, sisa pekerjaan direncanakan dilanjutkan dari STA 3.100 hingga STA 16.000 atau hingga kilometer ke-16.

"Dari STA 3.100 sampai STA 16.000 itu yang kami usulkan sebagai lanjutan melalui Inpres Jalan Daerah," pungkas Oong. (Santi/Dya)

Wali Kota Malang Tegaskan Mutasi Tanpa Mahar

MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan proses mutasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bebas dari praktik mahar jabatan. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak percaya dan segera melapor jika menemukan oknum dalam praktik jual beli jabatan.

"Iya, tadi saya menekankan kepada ASN. Jangan percaya dengan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan saya atau Wakil Wali Kota Malang bahwa untuk mendapatkan jabatan tertentu itu bisa tetapi dengan adanya biaya dan lain-lain," ujar Wahyu, ditemui usai Apel Pagi di Balai Kota Malang, Senin (26/1/2026).

Ditegaskannya, apabila ada pihak yang menemukan praktik semacam itu, agar segera melapor langsung kepada dirinya. Pemkot Malang, kata Wahyu, tidak akan mentolerir pelanggaran tersebut. "Semua akan kami proses, baik yang memberi maupun yang menerima," tegasnya.

Wahyu mengakui, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk. Namun, ia mengaku kerap menerima informasi informal dari lapangan terkait isu jual-beli jabatan tersebut.

"Belum ada yang melapor secara resmi. Tapi saya sering turun ke lapangan, ada yang menyampaikan, 'Pak, isunya begini, begitu'. Itu yang saya pastikan tidak benar," ungkapnya.

Ia juga membenarkan adanya indikasi oknum tertentu yang diduga menyalahgunakan nama dirinya dan Wakil Wali Kota Malang untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Untuk diketahui, saat ini terdapat sejumlah jabatan strategis di Pemkot Malang yang masih dijabat oleh pelaksana harian (Plh), yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Asisten Administrasi Umum (Asisten III), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sementara itu, jabatan yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) meliputi Inspektorat Inspektorat Kota Malang, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Lebih lanjut, menanggapi lamanya proses mutasi jabatan, Wahyu menegaskan hal tersebut dilakukan

bukan tanpa alasan. Ia dan Wakil Wali Kota Malang masih membutuhkan waktu untuk mengenali dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh.

Menurutnya, proses penilaian tersebut memang membutuhkan waktu agar keputusan mutasi memiliki dasar yang kuat dan objektif. "Hampir satu tahun setelah saya dilantik, ini waktu yang cukup bagi kami untuk menilai calon-calon yang ada, termasuk situasi dan kondisi di lapangan," katanya.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan berdasarkan data primer dan sekunder, hasil pengamatan langsung, serta berbagai masukan yang diterima, termasuk dari masyarakat dan media.

Terkait waktu pelaksanaan mutasi, Wahyu memastikan proses tersebut akan segera dilakukan dalam waktu



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

dekat. Menurutnya, keunggulan wilayah Kota Malang yang relatif kecil memungkinkan dirinya untuk cepat turun langsung ke lapangan jika ditemukan permasalahan.

"Kalau dulu saat saya jadi Sekda di Kabupaten Malang itu kan wilayahnya luas, sekarang Kota Malang kecil. Kalau ada sesuatu, saya bisa langsung turun, tidak butuh waktu lama," pungkasnya. (Santi/Dya)

XI JINPING PECAH JENDERAL PALING BERPENGARUH

Zhang Youxia Dituduh Bocor Rahasia Nuklir ke AS

Kepemimpinan militer China kembali diguncang setelah Presiden Xi Jinping memecat salah satu jenderal paling berpengaruh dan terdekat dengannya, Zhang Youxia. Jenderal senior berusia 75 tahun itu kini tengah diselidiki otoritas penegak hukum militer atas dugaan pelanggaran disiplin berat, korupsi, hingga tuduhan membocorkan rahasia nuklir China kepada Amerika Serikat (AS).

Zhang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua peringkat pertama Komisi Militer Pusat (Central Military Commission/CMC)--badan komando tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA)--selama bertahun-tahun dikenal sebagai sekutu militer paling terpercaya Xi Jinping. Dalam struktur militer, posisinya berada tepat di bawah Xi.

Langkah pemecatan Zhang diumumkan Kementerian Pertahanan China pada 24 Januari 2026, bersamaan dengan pemecatan Jenderal Liu Zhenli, Kepala Departemen Staf Gabungan CMC. Keduanya disebut sedang diselidiki atas dugaan "pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum serius", meski otoritas Beijing tidak memerinci detail kasus tersebut.

Namun, laporan sejumlah media internasional mengungkapkan dugaan yang jauh lebih serius. Wall Street Journal, mengutip sumber yang



Saat Zhang Youxia (depan) bersumpah dengan anggota Komisi Militer Pusat di Kongres Rakyat Nasional di Beijing pada tahun 2023. (Reuters)

mengetahui pengarahan tingkat tinggi kasus ini, melaporkan bahwa Zhang diduga membocorkan data teknis inti program senjata nuklir China kepada Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Ia juga disebut menerima suap terkait sejumlah keputusan jabatan strategis di tubuh militer.

Media pemerintah China mengambil nada keras. PLA Daily,

surat kabar resmi militer China, menyebut Zhang dan Liu telah "secara serius mengkhianati kepercayaan dan harapan Partai Komunis serta Komisi Militer Pusat".

Editorial tersebut juga menuduh k e d u a n y a " m e n g a n c a m kepemimpinan absolut Partai Komunis" dan "merusak sistem tanggung jawab tertinggi Ketua

SIAPA ZHANG YOUXIA?

- **NAMA LENGKAP:** Zhang Youxia (张又侠).
- **TEMPAT & TANGGALLAHIR:** Beijing, Juli 1950 (Usia 75 tahun).
- **ASAL:** Weinan, Provinsi Shaanxi.
- **LATAR BELAKANG KELUARGA:** Berasal dari elite militer "Pangeran" (princeling). Ayahnya, Zhang Zongxun, adalah seorang jenderal veteran Tentara Merah dan sekutu dekat Mao Zedong.
- **KARRIER MILITER & JABATAN**
 - Jabatan Terakhir:** Wakil Ketua Pertama Komisi Militer Pusat (CMC), posisi militer tertinggi di bawah Presiden Xi Jinping.
 - Anggota Politbiro:** Menjadi anggota Politbiro Partai Komunis China (PKC) sejak 2017.
 - Pengalaman Tempur:** Salah satu dari sedikit jenderal China yang memiliki pengalaman tempur nyata, terutama dalam Perang China-Vietnam tahun 1979 dan 1984.
 - Riwayat Komando:**
 - Komandan Wilayah Militer Shenyang (2007-2012).
 - Kepala Departemen Pengembangan Peralatan CMC (2012-2017), di mana ia mengawasi modernisasi senjata dan program luarangkasa China.

Komisi Militer Pusat" yang berada di tangan Xi Jinping.

"Tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, jika korupsi dilakukan, tidak akan ada keringanan hukuman," tegas PLA Daily dalam editorialnya. (rtr,ist,gus/dya)

China Larang Warganya Liburan Imlek ke Jepang



(Ilustrasi) Jumlah wisatawan asal China ke Jepang anjlok hingga 45 persen buntut ketegangan diplomatik dua negara tersebut. (ist.dok)

pariwisata kedua negara.

Kementerian Luar Negeri China, melalui Departemen Urusan Konsuler, k e m b a l i m e n e g a s k a n p e r i n g a t a n perjalanan itu pada Senin (26/1/2026). Otoritas Beijing menilai situasi keamanan publik di Jepang mengalami kemunduran dan berpotensi membahayakan k e s e l a m a t a n wisatawan asal

Negeri Tirai Bambu.

"Baru-baru ini, keamanan publik di Jepang telah memburuk, dengan seringnya terjadi insiden tindakan ilegal dan kriminal yang menargetkan warga negara China," demikian pernyataan resmi otoritas China. "Warga negara China di Jepang menghadapi ancaman keamanan yang serius," lanjut pernyataan

tersebut.

Selain persoalan kriminalitas, pemerintah China juga menyoroti faktor bencana alam. Disebutkan bahwa serangkaian gempa bumi terjadi di sejumlah wilayah Jepang dalam beberapa waktu terakhir dan menyebabkan korban luka, sehingga menambah risiko bagi wisatawan.

Peringatan ini tidak datang secara tiba-tiba. Hubungan China dan Jepang tengah berada dalam fase tegang sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, pada November lalu, mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang jika terjadi serangan terhadap Taiwan.

Pernyataan itu memicu respons keras dari Beijing, yang memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya.

Sebagai bagian dari respons atas dinamika tersebut, pemerintah China sebelumnya juga telah mendorong warganya untuk lebih berhati-hati dan menghindari perjalanan ke Jepang. Dampaknya langsung terasa pada industri pariwisata Negeri Sakura.

Data terbaru menunjukkan, jumlah wisatawan asal China ke Jepang anjlok hingga 45 persen pada bulan lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total kunjungan turun menjadi sekitar 330.000 orang. Penurunan ini menjadi pukulan signifikan, mengingat wisatawan China selama ini merupakan salah satu tulang punggung pariwisata Jepang.

Sebelum ketegangan meningkat, turis China menyumbang sekitar seperempat dari total wisatawan asing yang datang ke Jepang. Berdasarkan data resmi pemerintah Jepang, hampir 7,5 juta warga China tercatat bepergian ke Jepang selama sembilan bulan pertama 2025.

Daya tarik utama bagi wisatawan China antara lain melemahnya nilai tukar yen, yang membuat biaya belanja dan perjalanan menjadi lebih murah. Pada kuartal ketiga 2025 saja, wisatawan China dilaporkan menghabiskan dana hingga 3,7 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 62 triliun, di Jepang. (wid,rls,rtr/dya)

Pemerintah China secara resmi mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar menunda atau menghindari perjalanan ke Jepang menjelang libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah memanasnya hubungan diplomatik Beijing-Tokyo, yang berdampak langsung pada sektor

HIPOTERMIA, ANCAMAN MEMATIKAN DI GUNUNG

Kasus Pendaki Slamet Jadi Pengingat

Pendaki bernama Syafiq Ali Razan (18) ditemukan meninggal dunia setelah dinyatakan hilang selama sekitar 17 hari di kawasan Gunung Slamet. Informasi penemuan jenazah tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Clekatakan, Pemalang, Sutrisno.

Ketua Operasi SAR Wanadri, Arie Affandi, menyampaikan bahwa korban murni ditemukan dalam kondisi terbuka, bukan tertimbun pasir maupun terkubur. Dari hasil pengamatan dokumentasi di lokasi, diperkirakan korban baru meninggal beberapa hari sebelum berhasil ditemukan.

Arie menuturkan dugaan Syafiq Ali meninggal akibat hipotermia. Dugaan tersebut diperkuat dengan kondisi korban yang tidak mengenakan perlengkapan mendaki secara lengkap.

"Korban mengalami hipotermia. Ia sempat melepasan celana hingga sebatas dengkul, serta sepatu dan kaos kaki. Ceceran perlengkapan itu ditemukan di sekitar lokasi," tambahnya.

Apakah hipotermia itu?

Mengacu pada Mayo Clinic, hipotermia merupakan kondisi medis serius yang terjadi ketika suhu inti tubuh turun di bawah 35 derajat Celsius. Penurunan suhu ini membuat tubuh kehilangan kemampuan untuk mengatur panas secara normal. Saat suhu tubuh menurun drastis, kinerja organ vital seperti jantung, sistem saraf, dan organ

lainnya akan terganggu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan denyut jantung melambat, gangguan pernapasan, hingga penurunan kesadaran. Apabila tidak segera ditangani, hipotermia berisiko memicu gagal jantung dan gangguan sistem pernapasan yang berujung pada kematian.

Hipotermia umumnya disebabkan oleh paparan suhu dingin dalam waktu lama, baik karena berada di lingkungan bersuhu rendah, cuaca ekstrem, hujan, angin kencang, maupun akibat terendam air dingin. Risiko kondisi ini meningkat ketika seseorang mengenakan pakaian yang tidak memadai atau tubuh berada dalam kondisi lelah dan kurang energi.

Hipotermia ditandai dengan sejumlah gejala yang muncul secara bertahap seiring menurunnya suhu tubuh. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami gemetaran sebagai respons alami tubuh untuk menghasilkan panas. Namun, seiring kondisi memburuk, gemetaran bisa berkurang atau bahkan berhenti, menandakan suhu tubuh sudah sangat rendah.

Gangguan pada sistem saraf membuat penderita mengalami kesulitan berbicara, seperti ucapan yang tidak jelas atau bergumam. Pernapasan menjadi lambat dan dangkal, disertai denyut nadi yang melemah, karena fungsi jantung dan paru-paru ikut menurun. Selain itu, penderita kerap menunjukkan kecengungan atau penurunan koordinasi, sehingga sulit berjalan atau melakukan

gerakan sederhana.

Gejala lain yang sering muncul adalah rasa kantuk berlebihan dan energi yang sangat rendah, membuat penderita tampak lemas dan apatis. Kondisi ini diperparah dengan kebingungan, disorientasi, hingga kehilangan ingatan, sehingga penderita tidak menyadari bahaya yang sedang dialaminya.

Pada tahap lanjut, hipotermia dapat menyebabkan penurunan kesadaran, bahkan pingsan, yang merupakan kondisi darurat dan membutuhkan penanganan medis segera.

Mengenali gejala-gejala hipotermia sejak dini sangat penting, terutama bagi mereka yang beraktivitas di lingkungan bersuhu dingin, guna mencegah kondisi berkembang menjadilebih fatal.

Jika seseorang mengalami gejala hipotermia, langkah penanganan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kondisi semakin parah. Penanganan awal difokuskan pada menghindarkan paparan dingin dan menghangatkan tubuh secara bertahap.

Langkah pertama adalah memindahkan penderita ke tempat yang lebih hangat dan kering, terlindung dari angin atau hujan. Jika pakaian korban basah atau lembap, segera ganti dengan pakaian kering untuk mencegah hilangnya panas tubuh lebih lanjut.

Tubuh kemudian dapat dibungkus dengan selimut, jaket tebal, atau bahan apa pun yang dapat menahan panas, terutama pada bagian dada, perut, dan

kepala.

Untuk penderita yang masih sadar, berikan minuman hangat dan manis seperti teh atau air gula guna membantu meningkatkan energi dan suhu tubuh. Namun, hindari pemberian alkohol atau kafein karena dapat memperburuk kondisi.

Tubuh juga sebaiknya dihangatkan secara perlahan, misalnya dengan kontak tubuh ke tubuh atau membungkus korban menggunakan selimut kering, bukan dengan paparan panas ekstrem.

Pemanasan yang terlalu cepat atau mendadak justru berisiko memicu gangguan irama jantung dan memperburuk kondisi korban. Selain itu, pastikan korban berada di tempat yang terlindung dari angin dan suhu dingin untuk mencegah penurunan suhu tubuh lebih lanjut.

Apabila korban mengalami penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, menggigil hebat yang tidak terkendali, atau kondisinya tidak menunjukkan perbaikan, segera cari pertolongan medis.

Dalam kasus hipotermia berat, penanganan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan metode pemanasan khusus, pemberian cairan hangat, serta pemantauan ketat terhadap fungsi organ vital.

Oleh karena itu, penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi serius sekaligus menyelamatkan nyawa penderita hipotermia. (Inna - UINSA berkontribusi dalam tulisan ini).



Langkah-langkah Esensial Persiapan Mendaki Gunung

1. Sistem Pakaian Berlapis (Layering System)

Hindari pakaian berbahan katun karena menyerap keringat dan lama kering, yang dapat mendinginkan suhu tubuh dengan cepat. Gunakan sistem tiga lapis: Base Layer, Mid Layer, Outer Layer

2. Perlengkapan Tidur yang Memadai

Hipotermia sering menyerang saat pendaki beristirahat di malam hari. Siapkan : Sleeping Bag, Matras, Pakaian Kering

3. Nutrisi dan Hidrasi

Tubuh membutuhkan bahan bakar untuk memproduksi panas. Konsumsi Kalori Tinggi, Minuman Hangat, Cukup Cairan

4. Manajemen Kondisi Basah

Basah adalah musuh utama di gunung. Gunakan : Jas Hujan (Raincoat), Cover Bag & Dry Bag

5. Lindungi Ekstremitas Tubuh

Banyak panas tubuh hilang melalui kepala, tangan, dan kaki. Gunakan kupluk (beanie) yang menutupi telinga. Gunakan sarung tangan dan kaos kaki cadangan jika yang utama basah.



Roket Raksasa NASA Siap Diuji, Misi Artemis II Menuju Bulan Kian Dekat

NASA bersiap melaksanakan misi peluncuran berawak ke Bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Peluncuran tersebut diperkirakan paling cepat berlangsung pada pekan pertama Februari, menandai babak baru eksplorasi luar angkasa melalui misi Artemis II.

Sebagai bagian dari persiapan akhir, NASA telah mengeluarkan roket raksasa Space Launch System (SLS) beserta kapsul antariksa Orion dari Gedung Perakitan Kendaraan (Vehicle Assembly Building) menuju landasan peluncuran. Roket SLS tiba di Kompleks Peluncuran 36B di Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, sekitar 11,5 jam setelah meninggalkan gedung perakitan.

"Dalam beberapa hari ke depan, para insinyur dan teknisi akan mempersiapkan roket Artemis II

untuk melaksanakan gladi bersih. Uji coba ini mencakup operasi pengisian bahan bakar dan prosedur hitung mundur," ujar pejabat NASA.

"Akhir Januari, tim akan mengisi roket dengan propelan kriogenik, menjalankan hitung mundur, serta berlatih mengelola propelan dan roket dengan aman. Semua langkah ini sangat penting sebelum misi Artemis berawak pertama."

Misi Artemis II dijadwalkan berlangsung sekitar 10 hari dan bertujuan mempersiapkan pendaratan manusia di permukaan Bulan untuk pertama kalinya sejak era misi Apollo pada 1960-an dan 1970-an. Jika seluruh sistem dinyatakan siap, tanggal peluncuran paling awal diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Februari.

Selain kesiapan teknis, peluncuran juga bergantung pada posisi Bulan.

Jendela peluncuran hanya tersedia sekitar satu minggu pada awal setiap bulan, diikuti jeda sekitar tiga minggu tanpa peluncuran. Sejumlah tanggal potensial telah disiapkan, yakni 6, 7, 8, 10, dan 11 Februari. Opsi lain tersedia pada 6, 7, 8, 9, dan 11 Maret, serta 1, 3, 4, 5, dan 6 April.

Artemis II akan membawa empat kru, terdiri dari Komandan NASA Reid Wiseman, pilot Victor Glover, serta dua spesialis misi, termasuk Jeremy Hansen dari Badan Antariksa Kanada (Canadian Space Agency). Para astronot akan melakukan perjalanan melampaui sisi terjauh Bulan, yang berpotensi mencetak rekor jarak terjauh yang pernah ditempuh manusia dari Bumi, melampaui rekor misi Apollo 13. Selama misi, kru akan menguji sistem

pendukung kehidupan, proporsi, daya, dan navigasi kapsul Orion. Mereka juga akan berperan sebagai subjek uji medis, dengan mengirimkan data serta citra langsung dari deep space.

NASA menegaskan bahwa Artemis II tidak akan melakukan pendaratan di Bulan. Misi ini menjadi fondasi bagi Artemis III, yang ditargetkan sebagai misi pendaratan manusia di Bulan. NASA memperkirakan peluncuran Artemis III paling cepat dilakukan pada awal 2027, meski para ahli menilai 2028 sebagai waktu yang lebih realistik.

Hingga kini, wahana pendarat yang akan membawa kru ke permukaan Bulan belum ditetapkan, dengan dua kandidat utama yakni Starship milik SpaceX dan wahana dari Blue Origin. Selain itu, baju antariksa yang diproduksi oleh perusahaan Axiom Space juga belum sepenuhnya siap digunakan.

Jika Artemis III berhasil dilaksanakan, astronot akan mendarat di wilayah kutub selatan Bulan dengan tujuan membangun kehadiran manusia secara berkelanjutan. Program Artemis selanjutnya, yakni Artemis IV dan V, akan mulai membangun Gateway, sebuah stasiun luar angkasa kecil yang mengorbit Bulan. Tahapan ini akan diikuti pendaratan lanjutan, penambahan modul Gateway, serta pengoperasian robot penjelajah.

NASA menegaskan program Artemis melibatkan banyak negara agar manusia dapat tinggal dan bekerja di Bulan dalam jangka waktu lebih lama. Misi terakhir manusia ke Bulan terjadi pada Apollo 17, yang mendarat pada 12 Desember 1972. Dari total 24 astronot yang pernah terbang ke Bulan dalam program Apollo, 12 di antaranya pernah berjalan di permukaan Bulan, dan kini hanya lima yang masih hidup. (Itqiyah_UINSA berkontribusi dalam penulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI) | **WARTAWAN MUDA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

Musim Hujan Tetap Kece, Ini 5 Jaket yang Wajib Ada di Lemari

Musim hujan kerap membuat aktivitas di luar ruangan menjadi lebih menantang. Selain harus bersiap menghadapi hujan angin yang datang secara tiba-tiba, pemilihan pakian juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap terasa hangat dan nyaman sepanjang hari.

Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, jaket menjadi salah satu item wajib yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga menjadi pemanis penampilan.

Siring berkembangnya dunia fashion lokal, kini semakin banyak brand dalam negeri yang menghadirkan jaket dengan desain yang menarik, menggunakan bahan yang nyaman, serta fitur fungsional yang pelengkap saat beraktivitas di musim hujan.

Mulai dari jaket yang berbahan tahan air hingga model dengan lapisan hangat di bagian dalam, pilihan yang tersedia cukup beragam dan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan serta gaya masing-masing.

Berikut beberapa rekomendasi jaket dari brand lokal yang bisa menjadi pilihan untuk menemani aktivitas selama musim hujan

Komeru Taslan Jacket Humblezing

Jaket ini dirancang untuk mendukung aktivitas di musim hujan dengan mengutamakan kenyamanan serta tampilan yang tetap stylish. Menggunakan bahan polyester water resistant, jaket ini mampu melindungi tubuh dari gerimis ringan tanpa menimbulkan rasa gerah atau berat saat dikenakan. Di bagian dalam, terdapat lapisan dri-fit lining yang membantu menjaga sirkulasi udara, sehingga jaket tetap nyaman dipakai dalam waktu lama.

Dari segi desain, Komeru Taslan Jacket dilengkapi dengan dua saku depan dan satu saku dalam yang praktis untuk menyimpan barang kecil. Hood bawaan dengan model peaked hood memberikan perlindungan tambahan di bagian kepala, sementara penutup kombinasi kancing dan risleting menambahkan kesan rapi sekaligus fungsional. Jaket ini dapat dibeli melalui situs resmi atau lokapasar Humblezing dengan harga sekitar Rp. 315.000.

M231 Bomber Jacket

Bagi yang menyukai tampilan simbol namun tetap modern, jaket bomber dari M231 bisa menjadi pilihan yang tepat. Menggunakan bahan taslan yang dikenal rengan,

halus, serta memiliki ketahanan terhadap angin dan percikan air, jaket ini cocok digunakan untuk aktivitas harian di berbagai kondisi cuaca. Selain itu, bahan taslan juga membuat jaket terasa nyaman tanpa membuat gerak menjadi terbatas.

Desain bomber yang klasik diapadukan dengan potongan yang rapi, sehingga jaket ini mudah dipadukan dengan berbagai gaya, baik kasual maupun semi sporty. Cocok digunakan untuk ke kampus, bekerja, atau sekedar beraktivitas santai di luar ruangan. Jaket ini dapat dibeli melalui lokapasar M321 dengan kisaran harga sekitar Rp. 200.000

Nookly Parka Ashton Cream 2.0

Nookly menhadirkan jaket parka dengan sentuhan elegan melalui Parka Ashton Cream 2.0. Jaket ini menggunakan bahwa kanvas yang kokoh, dipadukan dengan lapisan rasa hangat sekaligus suede di bagian dalam yang memberikan rasa hangat sekaligus menambah kesan mewah saat dikenakan. Kombinasi material tersebut membuat jaket ini cocok digunakan saat cuaca sejuk maupun hujan ringan.

Selain itu, jaket ini juga dilengkapi k扣luk serta empat kantong fungsional yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang kecil saat beraktivitas. Potonganya dibuat nyaman untuk pemakian sehari-hari dan mudah dipadukan dengan berbagai outfit kasual. Produk ini dapat dibeli melalui lokapasar Nookly di platform shopee dengan harga sekitar Rp. 319.000.

Eiger Geva Collarless Jacket

Jaket perempuan dari Eiger ini dirancang dengan bahan katun yang lembut dan nyaman, sehingga cocok digunakan untuk aktivitas harian, baik di dalam maupun luar ruangan. Potongan loose fit membuat jaket terasa ringan, tidak membatasi gerak, serta memberikan tampilan santai yang tetap terlihat rapi.

Dari sisi fungsi, jaket ini dilengkapi dua saku dada dan dua saku pinggang di bagian depan yang dapat digunakan untuk menyimpan barang kecil. Terdapat pula adjuster di bagian pinggang yang memungkinkan jaket disesuaikan dengan bentuk tubuh, sehingga lebih pas saat dikenakan. Penutup risleting memudahkan pemakian, sementara desain tanpa kerah memberi kesan simpel dan modern. Jaket ini di bandrol dengan harga sekitar Rp. 350.000 dan dapat dibeli di lokapasar Eiger.

DELIRIUM Puffer Crinkle Jacket

DELIRIUM menghadirkan jaket puffer dengan material taslan crinkle yang ringan namun tetap kuat. Tekstur khas pada bahan tersebut memberikan tampilan modern sekaligus membantu jaket lebih tahan terhadap angin dan percikan air. Di bagian dalam, jaket ini menggunakan isian dakron 0,6 yang mampu memberikan kehangatan tanpa membuat jaket terlalu tebal atau berat.

Untuk menunjang fungsi, jaket ini dilengkapi dengan resleting waterproof, dua saku samping, serta empat saku bagian dalam yang cukup untuk menyimpan berbagai kebutuhan kecil. Desain hooded juga memberikan perlindungan tambahan saat cuaca dingin atau hujan ringan. Jaket ini dapat dibeli melalui lokapasar DELIRIUM dengan harga Rp. 325.000. (Itqiyah_UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini)

Perawatan Jaket Musim Hujan

1. Pembersihan Awal

- Bilas, jangan dilipat saat basah

2. Pencucian

- Sabun lembut, cuci halus/ manual

3. Pengeringan

- Gantung, angin-anginkan, hindari matahari

4. Perawatan Waterproof

- Gunakan spray/DWR bila tak lagi tahan air

5. Penyimpanan

- Gantung di tempat kering



TEKA-TEKI PARTAI ...dari hal 1

Kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan memasuki babak baru. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang kini duduk sebagai terdakwa, mengungkap adanya partai politik dan organisasi masyarakat yang disebut ikut menikmati aliran dana dari praktik lancung tersebut.

Namun, pengakuan Noel justru memunculkan teka-teki baru. Di hadapan awak media sebelum sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Noel hanya memberikan petunjuk samar terkait partai politik yang dimaksud.

"Partainya ada huruf K-nya. Sudah itu dulu clue-nya, ya," kata Noel, Senin (26/1/2026).

Noel menolak menyebutkan nama, warna, maupun identitas lebih rinci dari partai tersebut. Ia juga enggan mengungkap organisasi masyarakat yang diduga ikut menikmati aliran dana, selain memastikan bahwa ormas tersebut tidak berbasis agama. "Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama," ujarnya singkat.

Dalam perkara ini, Noel telah mengakui kesalahannya. Usai menjalani sidang perdananya pada 19 Januari 2026, ia menyatakan siap bertanggungjawab atas perbuatannya dan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahannya," kata Noel.

"Pokoknya secara prinsip kami menghargai hukum yang sudah berlaku. Apalagi ini perbuatan saya. Saya akui saya bersalah," sambungnya.

Meski demikian, Noel menegaskan praktik pemerasan tersebut tidak dilakukan seorang diri. Ia menyebut secara tegas adanya satu partai politik dan satu organisasi masyarakat yang terlibat dalam aliran uang hasil pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," kata Noel.

Sebelumnya, Noel juga sempat menyatakan akan membuka identitas partai dan ormas tersebut ke publik pada waktu yang ia tentukan. "Jangan kasih tahu warnanya, clue-nya, yang jelas partai dan ormas. Partainya saya kasih tahu pekan depan," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi merespons hati-hati pernyataan Noel. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menganalisis seluruh keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan.

Hasil analisis tersebut akan menentukan apakah pernyataan Noel

dapat dijadikan alat bukti baru untuk pengembangan perkara, termasuk kemungkinan menjerat pihak lain di luar jajaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Modus Terstruktur

Dalam surat dakwaan, jaksa membeberkan praktik pemerasan dan pungutan liar yang berlangsung secara sistematis di lingkungan Direktorat Bina Kelembagaan K3 sepanjang 2021 hingga 2025. Tarif tidak resmi dipatok antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat.

Jika pemohon menolak membayar, proses penerbitan sertifikat yang seharusnya rampung dalam sembilan hari kerja akan diperlambat, dipersulit, atau dinysatakan tidak lengkap.

Uang pungutan tersebut dikumpulkan oleh perusahaan jasa K3 dari para pemohon, salah satunya PT Kreasi Edukasi Mandiri Indonesia, lalu disetorkan ke oknum pejabat Kemnaker dan dibagikan secara berjenjang melalui rekening nomine.

Total aliran dana dalam perkara ini mencapai Rp9,59 miliar dan

melibatkan sedikitnya 15 mantan pejabat Kemnaker, dengan status hukum beragam, mulai dari terdakwa, tersangka baru, hingga saksi.

Noel didakwa meminta jatah Rp3,3 miliar serta satu unit motor Ducati dari praktik pemerasan tersebut. Ia didakwa bersama sepuluh orang lain, termasuk pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Bina Kelembagaan K3.

Dalam persidangan terpisah, Noel bahkan menyatakan siap dihukum mati jika terbukti bersalah. "Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini," kata Noel.

Uang Pemerasan Dianggap Rezeki

Fakta lain yang terungkap di persidangan menunjukkan bagaimana praktik pemerasan sertifikasi K3 berlangsung secara banal dan diterima sebagai sesuatu yang lumrah di internal Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/1/2026), Koordinator Perencanaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker, Ida Rochmawati,

mengungkap bahwa uang hasil pemerasan kerap dianggap sebagai 'rezeki' oleh para pegawai.

Kesaksian tersebut muncul saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi mekanisme pembagian uang nonteknis dari pengurusan sertifikasi K3. Dalam persidangan, jaksa menyebut pembagian dilakukan dengan skema 10 persen untuk operasional, serta masing-masing 45 persen untuk pimpinan dan pegawai Kemnaker.

Jaksa kemudian menggali sumber pedoman pembagian tersebut. "Ibu dapat pedoman untuk menentukan persentase itu dari siapa?" tanya jaksa. "Kalau untuk pimpinan, dari pimpinan," jawab Ida.

Ida mengaku bertugas menyertorkan bagian tersebut kepada Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker, Hery Sutanto. "Siapa pimpinannya?" cecar jaksa. "Pak Hery," ujar Ida.

Jaksa lalu menanyakan bentuk penyampaian permintaan uang tersebut. "Nanti saya mau menghadap, kalau ada rezeki tolong disiapkan," ungkap Ida, menirukan perkataan Hery di persidangan. (tin,ist,kcm,kum/dya)

Respons Purbaya: Gua Enggak Terima Duit, Gaji Gua Gede

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengingatkannya agar berhati-hati karena disebut berpotensi "di-Noel-kan" atau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Purbaya menilai kemungkinan tersebut sangat kecil karena, menurutnya, ia tidak pernah menerima uang atau suap dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

"Oh biar saja, yang penting gua enggak terima duit. Noel kan terima (duit), kan gua enggak terima duit, gaji gua gede di sini (Menkeu), cukup. Case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Juanda, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menduga pernyataan Noel tersebut dilatarbelakangi oleh kekesalan pribadi. Ia menegaskan isu tersebut tidak akan mengganggu agenda reformasi perpajakan yang saat ini tengah dijalankan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya. Menurut Purbaya, selama ini ia selalu menjaga integritas dan tidak menerima uang dari pihak mana pun, sehingga tidak memiliki alasan untuk takut terhadap tudingan hukum.

Ia menambahkan, penerimaan uang atau suap justru akan menempatkannya pada posisi yang sangat rentan dan menghambat kinerjanya sebagai pejabat publik. "Mungkin kalau ada yang jebak naruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggungjawab ke Presiden, yang lain saya enggak peduli," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Noel melontarkan peringatan terbuka kepada Purbaya di sela persidangan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-Noel-kan. Hati-hati tuh, Pak Purbaya," ujar Noel kepada wartawan.

Noel menilai sejumlah kebijakan Purbaya, mulai dari pelarangan thrifting hingga kebijakan perpajakan, telah mengganggu kepentingan tertentu. "Siapa pun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu," kata Noel.

Disisi lain, Komisi

Pemberantasan Korupsi meminta Noel untuk tidak melontarkan narasi yang dinilai kontraproduktif dan lebih fokus menjalani proses persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan di luar konteks persidangan tidak akan mengubah fakta hukum yang sedang diperiksa oleh majelis hakim.

"Kami meminta terdakwa untuk lebih fokus pada jalannya persidangan, memberikan keterangan yang benar di hadapan majelis hakim, serta menghormati prinsip peradilan yang adil dan tidak mempengaruhi proses hukum secara tidak semestinya," kata Budi dalam keterangannya, Senin.

Budi menambahkan, masyarakat dapat mencermati seluruh fakta secara utuh karena persidangan bersifat terbuka. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan dan penuntutan perkara pemerasan pengurusan sertifikat K3 dilaksanakan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah dan sesuai ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mengamankan para terduga pelaku beserta barang bukti. Penyidik juga telah meminta keterangan para tersangka maupun saksi lainnya yang relevan untuk membangun konstruksi perkara," ujarnya. (wid,ist,kum/dya)

SENTIMEN POSITIF PEMBANGKIT RUPIAH: THOMAS DJIWANDONO DAN DATA EKONOMI AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bangkit pada perdagangan Senin (26/1/2026), setelah dalam beberapa hari sebelumnya nyaris menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Penguatan ini dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik, mulai dari pelemahan data ekonomi AS, langkah stabilisasi Bank Indonesia (BI), hingga terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,23 persen ke posisi Rp16.782 per dolar AS. Sejalan dengan itu, indeks dolar AS tercatat melemah 0,40 persen ke level 97,21. Sejumlah mata uang Asia lainnya juga menunjukkan



Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi XI Mukhammad Misbahkun (kiri) saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).ist

PROFIL SINGKAT THOMAS DJIWANDONO

LATAR BELAKANG
Putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono
Keponakan Presiden Prabowo Subianto

PENDIDIKAN:
S1 Sejarah – Haverford College (AS)
S2 Hubungan Internasional & Ekonomi Internasional –
Johns Hopkins University

REKAM JEJAK KARRIER
Mantan jurnalis Tempo & Indonesia Business Weekly
Pernah berkarier di NatWest Markets dan Castle Asia
Direktur Utama PT Comexindo International
(2010-2024)
Wakil Menteri Keuangan sejak Juli 2024

STATUS POLITIK
Mantan Bendahara Umum Partai Gerindra
Mundur dari jabatan bendahara sejak Maret 2025
Resmi keluar dari keanggotaan Gerindra per 31 Desember 2025

PROSES PEMILIHAN
Lolos fit and proper test Komisi XI DPR RI
Disetujui melalui musyawarah mufakat
Akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR

kinerja positif pada perdagangan hari ini.

Pengamat Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penguatan rupiah tak lepas

dari rilis data ekonomi AS yang berada di bawah ekspektasi pasar. Kondisi tersebut menekan permintaan terhadap dolar AS dan membuka ruang penguatan bagi mata uang

negara berkembang, termasuk rupiah.

“Dengan data AS yang kurang baik, permintaan dolar cenderung berkurang. Ini menjadi sentimen positif bagi rupiah,” ujar Nailul, Senin (26/1/2026).

Dari sisi domestik, Nailul menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia yang masih kuat. Hal itu memberikan keyakinan kepada pasar bahwa Bank Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Ia menyebut cadangan devisa terlihat dikuras untuk intervensi, yang menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga stabilitas rupiah. “Selain faktor fundamental, waktu penguatan rupiah juga dinilai bertepatan dengan terpilihnya Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono. Momentum ini turut membentuk sentimen positif di pasar. Isu ini bisa saja dimanfaatkan pasar untuk menggoreng sentimen,” katanya.

Senada, Direktur Utama OCBC Sekuritas Betty Goenawan menyampaikan harapan agar informasi dan kebijakan positif dari pemerintah dapat berlanjut sehingga menopang penguatan rupiah secara berkelanjutan.

“Kalau untuk hari ini, kami harapkan beberapa informasi positif dari yang dikeluarkan pemerintah, seperti cadangan devisa dan pemilihan Deputi Gubernur BI, bisa terus mendukung penguatan rupiah,” ujar Betty.

Dari sisi fundamental domestik, Betty menilai kondisi ekonomi nasional masih relatif solid. Hal itu tercermin dari Indeks Manager Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) manufaktur Indonesia yang tetap berada di zona eksansif, menandakan aktivitas produksi yang masih terjaga.

“Secara ekonomi sebenarnya masih bagus. PMI manufaktur masih positif, jadi dari sisi produksi kita masih kuat. Pelemahan rupiah sebelumnya lebih dipengaruhi faktor lain,” jelasnya.

Optimisme tersebut juga merembet ke pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih memiliki ruang penguatan hingga menembus level 10.000 pada 2026.

Sejumlah sektor diperkirakan menjadi penggerak utama, antara lain sektor perbankan yang dinilai memiliki fundamental kuat, sektor pertambangan khususnya mineral dan emas, serta sektor barang konsumsi.

Sementara itu, penguatan rupiah juga terjadi bertepatan dengan keputusan Komisi XI DPR RI yang menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI pengganti Judda Agung yang mengundurkan diri sejak 13 Januari 2026. (tin,ktn,blo/dya)

WAKIL MENTERI KEUANGAN Thomas Djiwandono menegaskan dirinya telah melepaskan seluruh jabatan dan afiliasi politik sebelum maju sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas menyatakan sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025, serta resmi keluar dari keanggotaan partai tersebut pada 31 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Thomas usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Deputi Gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Maret 2025 saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum Gerindra setelah 17 tahun menjabat. Tanggal 31 Desember 2025 saya sudah keluar